

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Geopark, atau yang juga dikenal dengan istilah taman bumi, adalah suatu pendekatan dalam pengelolaan pembangunan kawasan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Konsep ini berusaha untuk mengintegrasikan tiga jenis keragaman, yaitu keragaman geologi, keragaman hayati, dan keragaman budaya. Tujuannya adalah untuk mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi yang berpihak pada masyarakat, dengan tetap mengutamakan prinsip perlindungan dan pelestarian terhadap ketiga jenis keragaman tersebut. (Prakarsa et al., 2023) Geopark adalah konsep yang diperkenalkan oleh UNESCO pada tahun 2001 dan telah menjadi pendekatan terbaik hingga saat ini. Konsep ini berhasil menggabungkan berbagai sumber daya alam di sekitar area yang memiliki nilai geologi unik, dengan tujuan utama untuk melindungi kekayaan tersebut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Permadi et al., 2014). UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) atau Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB adalah lembaga khusus yang dibentuk oleh PBB pada tahun 1945. Tujuan utama dari organisasi ini adalah untuk mendorong perdamaian dan keamanan global dengan memfasilitasi kerjasama antarnegara dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Hal ini dilakukan guna memperkuat rasa saling menghormati, berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, supremasi hukum, hak asasi manusia, serta kebebasan mendasar.

Pada aspek konservasi Geopark bukan hanya kawasan dengan pemandangan alam yang indah dan warisan geologi yang unik, geopark berperan penting dalam upaya melestarikan dan melindungi berbagai aspek warisan alam dan budaya yang terdapat di sana. Konservasi dalam geopark memiliki makna yang luas dan mendalam, antara lain Konservasi geologi yaitu Perlindungan warisan geologi yang berharga, seperti batuan purba, fosil dan struktur geologi lainnya. selanjutnya Konservasi geodiversitas (keanekaragaman geologi) untuk tujuan ilmiah dan pendidikan, Konservasi

keanekaragaman hayati dimana tujuan utamanya adalah untuk Melindungi flora dan fauna unik dan langka yang hidup di geopark, Menjaga keseimbangan ekosistem dan habitat alami dan Mencegah kepunahan spesies dan degradasi habitat (Junarto & Salim, 2022) . Konservasi Pelestarian budaya Melestarikan budaya dan tradisi lokal yang berkaitan dengan geopark, Melestarikan situs budaya dan warisan sejarah, Mempromosikan nilai-nilai budaya dan intelektual lokal bagi masyarakat, dan yang terakhir adalah Konservasi bentang alam Menjaga keindahan alam dan keunikan bentang alam geopark dengan maksud dan tujuan untuk Mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat alam, Pengembangan lingkungan wisata alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Upaya konservasi ini tidak hanya membantu dalam melindungi warisan alam dan budaya tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat lokal. geopark mengandung unsur konservasi yang artinya geopark berkomitmen terhadap perlindungan dan pelestarian alam dan budaya. (Amsori et al., 2022)

warisan budaya, serta pemanfaatannya secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya adalah aspek pendidikan dimana geopark memiliki nilai edukasi yang tinggi, terintegrasi dua aspek utama lain dari geopark, yaitu pelestarian dan peningkatan ekonomi lokal. Nilai edukasi geopark dapat diartikan sebagai wadah untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai ilmu bumi, sejarah, dan budaya. Geopark menyediakan berbagai situs dan objek edukasi yang dapat dimanfaatkan untuk mempelajari berbagai ilmu tersebut, Tempat untuk belajar tentang proses-proses alam dan bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya. (Celebrating Earth Heritage, Sustaining Local Communities Sustainable Development Goals, 2022.)

Situs Geopark merupakan suatu gagasan yang diperkenalkan oleh UNESCO sejak tahun 200 dan dilanjutkan dengan pembentukan *Global Geopark Network* (GGN) yaitu jaringan yang melakukan tindakan-tindakan yang memiliki komitmen kerja sama dalam sebuah proyek untuk meningkatkan standar kualitas dari global geopark. Tindakan tersebut

merupakan upaya yang dilakukan oleh UNESCO dengan maksud mengidentifikasi kawasan geologis yang mengandung unsur edukasi, ekonomi hingga budaya (Wiratmoko et al., 2017.) .dalam geopark dilakukan penguatan status mulai dari Geopark lokal yaitu yang keberadaanya geopark dapat ditemukan pada berbagai tingkat, mulai dari kabupaten atau provinsi, hingga geopark nasional dan internasional (UNESCO Global Geopark). UNESCO mengakui geopark-geopark nasional di seluruh dunia sebagai bagian dari jaringan yang dikenal dengan Global Geoparks Network (GGN). Tujuan utama dari jaringan ini adalah untuk mempromosikan kawasan warisan bumi serta masyarakat lokal di dalamnya, yang memiliki nilai penting dalam hal konservasi, penelitian, dan pengembangan (baik ilmiah maupun ekonomi) secara berkelanjutan, sehingga mendapatkan pengakuan di tingkat internasional.

Kawasan karst Gunung Sewu adalah salah satu kawasan paling unik di Pulau Jawa. Kawasan ini terdiri dari sekitar 40.000 bukit karst berbentuk bukit kerucut, dengan panjang mencapai 85 km dan luas endapan batu gamping sekitar 1.300 km². Bentang alam karst ini terbentuk melalui proses karstifikasi, yang dimulai ketika batuan kapur terangkat dari dasar laut (uplift) sekitar 1,8 juta tahun lalu. Proses uplift ini menyebabkan terbentuknya teras pantai, sungai, dan singkapan batu pasir. Batu teras yang mengelilingi hampir setiap bukit di Gunung Sewu menjadi saksi sejarah lokal tentang bagaimana pengetahuan diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya untuk menjaga kelestarian tanah yang relatif tipis untuk kegiatan pertanian. Pegunungan Sewu membentang di tiga kabupaten yang berbeda, yakni Kabupaten Gunung Kidul (D.I Yogyakarta), Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), dan Kabupaten Pacitan (Jawa Timur). Secara geografis, kawasan ini terletak di antara 6°10' hingga 6°30' LS dan 99°35' hingga 100° BT, sekitar 25 km tenggara Yogyakarta, 109 km dari Pacitan, dan hanya 20 km dari Wonogiri. Ketiga daerah ini memiliki wilayah dominan berupa pegunungan berbukit, batu kapur, gua-gua, sungai bawah tanah, dan cekungan. (Junarto & Salim, 2022)

Pada tahun 2015, Gunung Sewu diakui sebagai Global Geopark oleh UNESCO, bersamaan dengan penetapan beberapa situs lainnya di luar negeri. Pada saat yang sama, sembilan situs baru ditambahkan ke dalam jaringan Global Geoparks Network (GGN). Kesembilan situs tersebut meliputi Gunung Sewu (Indonesia), Dunhuang (China), Zhijindong Cave (China), Troodos (Siprus), Sitia (Yunani), Reykjanes (Islandia), Pollino (Italia), Gunung Apoi (Jepang), dan Lanzarote serta Kepulauan Chinijo (Spanyol). Penambahan sembilan situs ini adalah hasil dari keputusan dalam Simposium Geoparks Network Asia-Pasifik ke-4 yang berlangsung di San'in Kaigan Geopark, Jepang, pada 15-20 September 2015. Penetapan Gunung Sewu sebagai Global Geopark melalui proses penilaian oleh Komisi Geopark UNESCO, dengan melengkapi dokumen (dosier) sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh UNESCO. Global Geopark adalah wilayah yang mendukung pelestarian keragaman geologi melalui inisiatif yang dipimpin oleh masyarakat untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Global Geopark juga menjadi bagian dari sejarah panjang planet bumi, yang mencakup 4,6 miliar tahun dengan keragaman geologi yang membentuk setiap aspek kehidupan masyarakat. (Junarto et al., 2022)

Geopark Gunung Sewu dikelola oleh tiga pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Pacitan. Ketiga bupati tersebut, yakni Bupati Gunungkidul, Bupati Pacitan, dan Bupati Wonogiri, sepakat untuk menandatangani peraturan bersama mengenai pengelolaan Geopark Gunung Sewu. Penandatanganan peraturan ini mencerminkan komitmen bersama ketiga kabupaten untuk bekerja sama dalam menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan Karst Gunung Sewu. Pengelolaan Geopark Gunung Sewu awalnya ditetapkan melalui Keputusan Bersama antara Bupati Gunungkidul (Nomor 418/KPTS/2012), Bupati Wonogiri (Nomor 23/2012), dan Bupati Pacitan (Nomor 18845/660/KPTS/408.21/2012), yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bersama Bupati Pacitan, Bupati Wonogiri, dan Bupati Gunungkidul Nomor 27, 25, dan 24 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengelola Geopark Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Dalam

menjalankan tugasnya, organisasi pengelola Geopark ini memiliki struktur yang terdiri dari seorang Penasehat yang merupakan kepala daerah dari ketiga kabupaten, seorang Ketua Badan Pengelola yang dipegang oleh Sekretaris masing-masing daerah, serta Pelaksana Harian yang dibantu oleh Komisi Teknis yang anggotanya berasal dari berbagai sektor dan disiplin ilmu. Komisi-komisi tersebut mencakup Komisi Ilmiah, Pengembangan, Promosi dan Kelembagaan, Konservasi, serta Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu, terdapat pula Kelompok Kerja Tenaga Ahli dan Sekretariat, masing-masing dengan tugas utama dalam pengelolaan Geopark Gunung Sewu. Struktur organisasi ini dapat dilihat lebih jelas pada tabel yang disediakan.

Dalam proses pengakuan oleh UNESCO Geopark Gunung Sewu telah melalui tahapan revalidasi yakni proses penilaian ulang yang dilakukan oleh UNESCO guna memastikan bahwa geopark gunung sewu masih memenuhi standart dan kriteria yang telah ditetapkan. Proses ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan Geopark Gunung Sewu berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Sebelumnya, pada tahun 2015, UNESCO telah mengakui Gunung Sewu sebagai UNESCO Global Geopark. Revalidasi I dilaksanakan pada tahun 2019 dan kemudian kembali lagi UNESCO melakukan revalidasi II atau evaluasi ulang terkait kelayakan pada 25-30 Juli 2023. Proses penilaian revalidasi oleh tim UNESCO yakni profesor Xiaochi Jin yang berasal dari China dan Soojae Lee dari Korea. Dalam proses revalidasi UNESCO akan memeriksa berbagai hal, mulai dari bagaimana cara Geopark Gunung Sewu melestarikan kekayaan geologisnya, sejauh mana masyarakat terlibat dalam pengelolaan geopark, hingga bagaimana geopark berkontribusi pada perekonomian daerah. Jika Geopark Gunung Sewu berhasil lolos revalidasi, maka statusnya sebagai warisan geologi dunia akan dipertahankan. Hal ini akan meningkatkan reputasi Geopark Gunung Sewu di mata dunia, menarik lebih banyak wisatawan, dan mendorong upaya pelestarian alam yang lebih baik. Selain itu, revalidasi juga dapat menjadi motivasi bagi pengelola geopark untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pengelolaannya.

Dalam proses Proses revalidasi Gunung Sewu sebagai UNESCO Global Geopark yakni sebuah perjalanan yang penuh dinamika, melibatkan berbagai pihak dan tantangan kompleks. Sejak awal inisiatif ini digulirkan, upaya kolaboratif telah dilakukan untuk menyusun dokumen revalidasi yang komprehensif, melibatkan pemerintah daerah, swasta atau akademisi, dan masyarakat setempat. Namun, dinamika tidak hanya berhenti pada aspek administratif. Tantangan koordinasi antar wilayah, pengelolaan kawasan yang melibatkan kepentingan beragam, serta adaptasi terhadap perubahan kebijakan menjadi rintangan yang harus diatasi. Meskipun demikian, upaya ini membuka peluang besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian warisan geologi, mengembangkan potensi wisata berkelanjutan, serta memperkuat identitas regional (Octavianti et al., 2023). Penetapan Gunung Sewu sebagai UNESCO Global Geopark tidak hanya memberikan pengakuan internasional atas keunikan geologis kawasan ini, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap masyarakat lokal. Peningkatan kunjungan wisatawan dapat memberikan dampak ekonomi yang positif, namun juga menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan konservasi dan pembangunan. Kabupaten Pacitan memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan Geopark Gunung Sewu.

Dengan kekayaan alam dan budaya yang unik, serta potensi pariwisata yang besar, Pacitan dapat menjadi contoh keberhasilan dalam pengembangan geopark yang berkelanjutan. Pacitan memiliki jumlah sebanyak 13 kawasan geopark atau sekitar 45% dari jumlah keseluruhan sebanyak 35 kawasan yang ada di Gunung Sewu. Kabupaten Pacitan memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan Geopark Gunung Sewu. Sebagai salah satu dari tiga kabupaten yang wilayahnya termasuk dalam kawasan geopark ini (bersama Gunungkidul dan Wonogiri), Pacitan memiliki kekhasan dan kontribusi yang unik. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

B. Rumusan Masalah

Dalam hal dinamika Revalidasi Geopark Gunung Sewu Pacitan sebagai global geopark UNESCO, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana dinamika revalidasi gunung sewu pacitan sebagai global geopark unesco?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini antara lain adalah;

1. Tujuan umum :
 - a. Untuk mengetahui secara mendalam dinamika proses revalidasi Gunung Sewu sebagai UNESCO Global Geopark.
 - b. Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam proses revalidasi tersebut.
 - c. Untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses revalidasi Gunung Sewu sebagai UNESCO Global Geopark.
 - d. Untuk Mengevaluasi efektivitas strategi yang telah dilakukan dalam proses revalidasi.
2. Tujuan khusus :
 - a. Untuk menganalisis perubahan kebijakan dan regulasi yang terkait dengan revalidasi UNESCO Global Geopark.
 - b. Untuk mengidentifikasi peran berbagai aktor dalam proses revalidasi.
 - c. Untuk menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari status UNESCO Global Geopark terhadap masyarakat sekitar Gunung Sewu.
 - d. Untuk mengembangkan kerangka kerja konseptual untuk memahami dinamika proses revalidasi UNESCO Global Geopark.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritik
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam riset ilmu pengetahuan dengan pemikiran ilmiah dan membantu meningkatkan

pemahaman tentang peran pemerintah daerah dalam pengelolaan geopark, mengembangkan model pengelolaan geopark yang efektif, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan geopark, mendukung kebijakan pengelolaan geopark nasional, dan memperkuat kerjasama internasional dalam pengelolaan geopark.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan literature bagi kabupaten Pacitan serta meningkatkan efektivitas pengelolaan Geopark Gunung Sewu, memperkuat kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan, meningkatkan kapasitas SDM, mendukung pengembangan ekonomi masyarakat lokal, dan meningkatkan pelestarian alam dan budaya di kabupaten Pacitan. Bagi masyarakat lokal dapat meningkatkan pemahaman tentang potensi dan manfaat Geopark Gunung Sewu, mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan geopark, dan meningkatkan kesejahteraan melalui program pemberdayaan ekonomi. Bagi pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pengelolaan geopark, mendukung pencapaian tujuan bersama, dan memastikan keberlanjutan manfaat geopark bagi semua pihak.

E. Penegasan Istilah

1. Dinamika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dinamika diartikan sebagai pergerakan dari dalam, kekuatan yang mendorong, serta semangat yang ada. Menurut Kartono definisi dinamika merupakan sebuah perubahan yang terjadi secara cepat maupun lambat, kecil ataupun besar, yang nyata dengan kehidupan yang sedang dijalani, sehingga orang tersebut menjalani alur hidup sebagaimana mestinya (Ristanti, Zain & Firmansyah., 2023). Dinamika merupakan suatu sistem hubungan yang saling terkait dan saling mempengaruhi antara berbagai unsur. Ketika salah satu unsur dalam sistem tersebut berubah, perubahan tersebut akan berdampak pada unsur lainnya. Secara singkat, dinamika dapat dipahami sebagai perilaku atau aksi seseorang

yang tidak hanya mempengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya, yang pada gilirannya dapat membawa perubahan dalam struktur kehidupan masyarakat tersebut.

Dinamika sendiri berarti mengacu pada perubahan dan perkembangan peran seseorang atau suatu pihak dalam suatu konteks tertentu. Perubahan ini bisa berlangsung secara perlahan atau terjadi secara mendadak, dan dipengaruhi oleh berbagai baik dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal dinamika berjalan seiring dengan bertambahnya pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan, peran seseorang dapat berkembang dan berubah, Pergeseran motivasi dan minat individu dapat mendorong perubahan dalam peran yang dijalankannya dan Perubahan tujuan dan nilai pribadi dapat memengaruhi cara seseorang menjalankan perannya. Faktor eksternal yang dapat memengaruhi dinamika meliputi perubahan lingkungan sosial, politik, ekonomi, atau budaya dapat menuntut perubahan seseorang, Perubahan dalam organisasi, struktur, atau teknologi dapat mengubah peran seseorang dalam pekerjaan dan Ekspektasi masyarakat, keluarga, atau atasan terhadap seseorang dapat memengaruhi cara mereka menjalankan perannya hingga timbulah dinamika.

2. Revalidasi

Revalidasi berasal dari kata validasi yang menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti pengesahan atau pengajuan kebenaran jadi revalidasi adalah proses penilaian ulang terhadap suatu hal, seperti untuk memastikan bahwa hal tersebut masih berlaku dan memenuhi standar yang ditetapkan. Proses ini umumnya melibatkan evaluasi terhadap kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang relevan dengan bidang terkait. Revalidasi memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, untuk memastikan bahwa kompetensi atau kualifikasi masih relevan dan sesuai dengan perkembangan terbaru di bidangnya. Hal ini penting karena ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang, sehingga kompetensi yang dimiliki juga perlu diperbarui agar tetap relevan. Kedua, untuk memperbarui informasi atau data. Informasi ini

mungkin perlu diperbarui karena adanya perubahan peraturan, standar, atau persyaratan lainnya. Ketiga, untuk memenuhi persyaratan peraturan atau standar yang berlaku.

3. UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB, adalah lembaga khusus yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945. UNESCO memiliki peran penting dalam mempromosikan perdamaian dunia dengan mendorong kerjasama global di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Network of National Geoparks Seeking UNESCO's Assistance, 2004*) . unesco berupaya untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan dengan mempromosikan pendidikan berkualitas bagi semua, mendorong penelitian ilmiah untuk mengatasi tantangan global, serta melestarikan warisan budaya dunia yang beragam. Selain itu, UNESCO juga berperan penting dalam memupuk dialog antarbudaya dan mempromosikan kebebasan berekspresi sebagai fondasi bagi masyarakat yang demokratis. Dengan demikian, UNESCO tidak hanya fokus pada pengembangan intelektual manusia, tetapi juga pada pembangunan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal

4. Geopark

Geopark merupakan area yang mencakup berbagai situs warisan geologi, baik karena kelangkaannya maupun keindahan yang dimilikinya, yang dilindungi untuk kepentingan konservasi. Situs-situs geologi ini mencerminkan karakteristik wilayah tersebut, termasuk sejarah, peristiwa, dan proses geologis yang terjadi. Mirip dengan taman nasional, geopark berada di bawah pengelolaan dan pengawasan pemerintah negara yang bersangkutan. GEOPARK sangat bernilai untuk pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya dan pembangunan sosial-ekonomi. Sebagai saksi masa lalu, geopark memberikan informasi tentang sejarah Bumi dan mungkin tidak hanya penting secara geologis

tetapi juga nilai arkeologis, ekologis, sejarah atau budaya.(Sulistiyadi et al., 2019) Tiga tujuan utama GEOPARK adalah perlindungan, pendidikan dan penelitian, dan pengembangan ekonomi lokal. Selain itu pendidikan lingkungan dan penelitian ilmiah yang luas, GEOPARK dapat menjadi faktor penting bagi pembangunan ekonomi lokal. Pengembangan orientasi wisata dan pengrajin baru dapat disukai ('geowisata', 'geoproduk'), seperti pembuatan kerajinan tangan baru yang memiliki konotasi geologis (pengecoran fosil, suvenir, dll.).(STATUTES OF THE INTERNATIONAL GEOSCIENCE AND GEOPARKS PROGRAMME, 2023)

F. Landasan Teori

1. Collaborative Governnance

a. Pengertian Collaborative Governance

Collaborative Governance terdiri dari dua kata, yaitu "*collaborative*" yang berarti kerja sama, dan "*governance*" yang merujuk pada pemerintahan. Dengan demikian, collaborative governance dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dilakukan melalui kerja sama. Ini adalah suatu proses yang melibatkan berbagai pihak untuk menyatukan kepentingan mereka dalam rangka mencapai tujuan bersama(subarsono,herlambang, 2023.) Konsep ini menekankan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan, aktor publik (pemerintah) dan aktor privat (akademisi) tidak bekerja secara terpisah atau masing-masing, melainkan saling berkolaborasi demi kepentingan masyarakat. Kolaborasi diartikan sebagai bentuk kerja sama antara berbagai aktor, organisasi, atau institusi untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai jika dilakukan secara terpisah atau independen. Menurut (Ansell & Gash, 2008) *Collaborative Governance* dapat diartikan sebagai suatu lingkungan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan resmi yang berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu, seperti merumuskan, mengimplementasikan kebijakan publik, atau mengelola sumber daya dan aset.

Pendapat lain mengenai *collaborative governance* yang telah dikemukakan oleh (Mcguire & Agranoff., 2010) menyatakan bahwa Secara khusus, tata kelola kolaboratif menekankan pentingnya hubungan horizontal yang didasarkan pada kesadaran sukarela antara anggota dari berbagai sektor. Hal ini disebabkan karena kebutuhan yang ada melebihi kapasitas dan peran satu organisasi publik tunggal, sehingga interaksi antar organisasi yang terlibat dalam kegiatan publik menjadi sangat penting. Kolaborasi antar berbagai pihak diperlukan untuk membangun tata kelola kolaboratif yang efektif guna memenuhi tantangan dalam pengelolaan pemerintahan, organisasi, dan sektor-sektor terkait.

Pandangan dari kedua ahli tersebut memiliki kesamaan dalam ide dan pemikiran. Menurut Ansell dan Gash, aspek kolaboratif dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih terstruktur dan efektif ketika diterapkan dalam kebijakan publik, khususnya dalam pengembangan dan pelaksanaan program pemerintah. Kerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan diharuskan untuk mendukung nilai musyawarah dan mencapai kesepakatan antara semua pihak atau pemangku kepentingan yang terlibat. Kolaborasi pemerintah ini lebih luas, mencakup penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Konsep kolaboratif ini menekankan pada kesukarelaan dalam praktiknya, dengan harapan bahwa setiap aktor, baik pemerintah daerah maupun akademisi, yang terlibat dalam kolaborasi dapat bekerja dengan optimal untuk mencapai tujuan bersama. menurut (Permatasari, 2023a) *Collaborative Governance* merujuk pada proses pengambilan keputusan bersama yang dilakukan secara kolektif, dengan tujuan mencapai konsensus dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan politik serta pelaksanaannya. Program atau kebijakan yang diterapkan menjadi lebih efektif karena melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan berbagai instansi, yang mendorong terjadinya kerjasama dan koordinasi. Konsep *Collaborative Governance* tidak terbatas hanya pada stakeholder pemerintah dan non-pemerintah, tetapi juga

berkembang melalui "*multipartner governance*," yang mencakup sektor swasta, masyarakat, dan organisasi sipil. Proses ini terbangun melalui sinergi peran berbagai pihak, serta perencanaan yang bersifat hybrid, seperti kolaborasi antara sektor publik-swasta dan sektor swasta-sosial. Menurut (COLLABORATIVE GOVERNANCE: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik, 2022), definisi ini mencakup beberapa kata kunci yang menggambarkan enam karakteristik utama, antara lain:

- a. Forum ini diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik atau aktor-aktor yang terlibat dalam lembaga tersebut.
 - b. Forum ini juga melibatkan aktor-aktor non-publik sebagai peserta.
 - c. Peserta dalam forum ini terlibat langsung dalam proses pembuatan dan pengambilan keputusan, yang mana keputusan tersebut tidak selalu bergantung pada aktor-aktor publik.
 - d. Forum ini terstruktur secara formal, dengan pertemuan yang dilakukan secara bersama-sama.
 - e. Tujuan forum ini adalah untuk mencapai kesepakatan bersama, yang berarti forum ini berorientasi pada konsensus.
 - f. Kolaborasi dalam forum ini difokuskan pada kebijakan publik dan manajemen publik.
- b. Tujuan *Collaborative Governance*

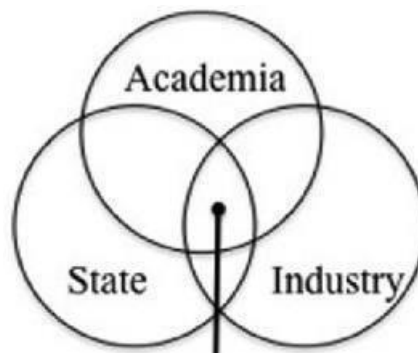
Menurut (Haryono, 2012) Kolaborasi dapat dipahami sebagai suatu bentuk kerjasama, interaksi, dan kompromi antara berbagai pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan merasakan dampak dan manfaat dari kerja sama tersebut. Collaborative governance tidak terjadi begitu saja, melainkan muncul sebagai hasil dari inisiatif berbagai pihak yang mendorong perlunya kerjasama dan koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh publik. ("*Collaborative Governance of Hajj Implementation in Indonesia: A Case Study at the Office of the Ministry of Religion in Bandung*," 2023) Collaborative Governance, atau kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, muncul sebagai respons terhadap kegagalan dalam

penerapan regulasi.

Pendapat di atas mengungkapkan bahwa *Collaborative Governance* tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hal ini dapat dilihat dari kebutuhan pemerintah untuk menjalin kerja sama dalam mengatasi tantangan yang ada.(Balogh, 2015) *Collaborative Governance* dapat dipahami sebagai suatu proses dan struktur dalam manajemen serta perumusan

keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai tingkat, baik dalam tataran. Konsep ini juga dianggap sebagai bagian dari perkembangan ilmu pemerintahan, terutama dengan kemunculan *Collaborative Governance* yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor, seperti akademisi, pemerintah, dan masyarakat, dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Triple Helix adalah konsep kolaborasi yang melibatkan sinergi antara pemerintah, universitas, dan industri. Dalam model ini, pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan, universitas sebagai pusat riset dan pengembangan, serta industri sebagai penyedia layanan dan kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Konsep *Triple Helix* ini, yang mengutamakan interaksi antara akademisi, dunia industri, dan pemerintah, pertama kali dikembangkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff pada tahun 1990-an (Leydesdorff, 2016). Konsep ini telah menjadi pendekatan utama yang diterapkan oleh pemerintah dalam mengembangkan inovasi dalam kebijakan.



Sebagai pemerintahan menyangkut pelaksanaan sistem pemerintahan yang mengacu pada kepentingan publik atau berorientasi pada publik dalam mengemban tanggung jawab dan fungsi keadministrasian pemerintahan (Permatasari, 2023). Penelitian ini mengeksplorasi dinamika revalidasi Geopark Gunung Sewu ke UNESCO sebagai sebuah rangkaian dari *collaborative governance model triple helix*. Kerangka teoretis ini mengasumsikan bahwa inovasi dan pengembangan wilayah, seperti revalidasi geopark, merupakan hasil dari interaksi sinergis antara tiga aktor utama: akademisi sebagai *knowledge producers* yang menghasilkan riset dan kajian ilmiah yang dilakukan oleh ahli Sejarah dan arkeologi, ahli geologi, hingga ahli biologi. pemerintah yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang) sebagai *policy makers* yang memfasilitasi kebijakan, perencanaan dan perizinan. serta masyarakat sebagai *key stakeholders* yang terdiri dari komunitas lokal, kelompok pariwisata, pengusaha, dan organisasi non-pemerintah yang berperan sebagai pelaku utama dan penerima manfaat langsung dari pengembangan geopark."

c. Proses Collaborative Governance

Proses kolaborasi dilakukan melalui beberapa tahap. Setiap tahap dalam model kolaborasi sangat penting untuk diperhatikan, karena menjadi strategi dalam pengelolaan urusan publik.

1. *Face to face dialogue* (Dialog antar Muka)

Bentuk dari *collaborative governance* dimulai dengan dialog langsung antara masing-masing lembaga yang terlibat. Seperti pertemuan antara pemerintah, akademisi dan masyarakat. Pertemuan tatap muka ini dapat mengurangi konflik dan ketegangan antara para pemangku kepentingan, sehingga memungkinkan mereka untuk bekerja sama demi mencapai tujuan dan manfaat bersama.

2. *Trust building* (membangun kepercayaan)

Pembangunan kepercayaan (*Trust Building*) harus dilakukan

sejak awal proses kolaborasi dimulai. Langkah ini penting agar pemangku kepentingan tidak terjebak dalam egoisme antar lembaga. Oleh karena itu, untuk membangun kepercayaan tersebut, dibutuhkan pemimpin yang memahami betul pentingnya kerja sama.

3. *Commitment to process* (komitmen dalam proses kolaborasi)

Untuk meminimalkan risiko dalam proses kolaborasi, dibutuhkan komitmen yang solid dari semua pemangku kepentingan. Kolaborasi memang tidak sederhana. Keterlibatan dalam hal ini menjadi tanggung jawab setiap pemangku kepentingan yang memandang hubungan tersebut sebagai hal yang baru dan perlu mengembangkan rasa tanggung jawab terhadapnya.

4. *Share Understanding* (pemahaman Bersama)

Pada tahap kolaborasi, negara-negara yang terlibat perlu saling berbagi pemahaman mengenai manfaat yang dapat diperoleh melalui kerjasama yang telah direncanakan. Pertukaran pemahaman ini dapat digambarkan sebagai pencapaian misi bersama, tujuan yang sama, visi yang sejalan, serta kesamaan ideologi dan nilai-nilai lainnya.

5. *Intermedieated Outcome* (dampak sementara)

Ini adalah pencapaian sementara dari suatu proses yang sedang berlangsung, yang memberikan manfaat dan memiliki nilai strategis.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional penelitian ini menjelaskan terkait dinamika revalidasi gunung Sewu Pacitan sebagai UNESCO Global Geopark. definisi ini digunakan untuk menjelaskan variabel yang ada di teori yang dapat dibuktikan dengan indikatornya yakni;

1. *Face to face dialog*

Face to face dalam teori penelitian *collaborative governance* digunakan untuk melihat interaksi langsung antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses revalidasi Geopark Gunung Sewu UNESCO dan dialog yang dilakukan.

2. *Trust building*

Trust Building dalam *collaborative governance* digunakan untuk melihat proses membangun dan memelihara kepercayaan antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses revalidasi.

3. *Commitment to process*

Commitment to process dalam teori *collaborative governance* digunakan untuk melihat tingkat keterlibatan, kesungguhan, dan konsistensi dari berbagai pihak terkait dalam menjalani tahapan-tahapan yang diperlukan untuk revalidasi Gunung Sewu sebagai UNESCO Global Geopark. Hal ini mencakup komitmen dari pemerintah daerah, masyarakat lokal, pengelola kawasan, akademisi, dan pihak-pihak lain yang terlibat

4. *Share understanding*

Share understanding dalam teori *collaborative Governance* digunakan untuk melihat Gunung Sewu sebagai UNESCO Global Geopark yang merujuk pada tingkat pemahaman dan kesadaran yang sama antara berbagai pihak terkait mengenai konsep geopark, kriteria revalidasi, serta manfaat dan tantangan yang terkait dengan status UNESCO Global Geopark.

5. *Intermediated outcome*

Intermediated outcome dalam teori *collaborative governance* dalam hal ini digunakan untuk mengetahui bagaimana proses yang kompleks dan melibatkan berbagai tahapan serta kriteria yang harus dipenuhi.

H. Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terkait masalah sosial atau kemanusiaan.

(Creswell,2016 .) Penelitian kualitatif merupakan metode yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial atau budaya dengan mengumpulkan data yang bersifat deskriptif dan mencerminkan realitas yang ada. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara detail kualitatif berusaha untuk memahami makna yang terkandung dalam fenomena, dari sudut pandang partisipan atau pelaku.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merujuk pada tempat di mana peneliti mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan di kawasan Geopark Gunung Sewu yang terletak di Kabupaten Pacitan, serta di instansi terkait yang memiliki pengetahuan dan kewenangan dalam mengelola data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan ingin mengetahui tentang dinamika pemerintah dalam pengelolaan geopark gunung sewu di wilayah kabupaten Pacitan yang memiliki 45 % situs yang dimiliki oleh kawasan Geopark GunungSewu.

c. Penentuan Informan

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling, juga dikenal sebagai sampling bertujuan, sampling penilaian, atau sampling subjektif, adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas dalam penelitian kualitatif. Dalam metode ini, peneliti memilih informan atau sampel secara sengaja berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu, bukan secara acak. Tujuan utama purposive sampling adalah untuk mendapatkan sampel yang informatif yang dapat memberikan data yang kaya dan mendalam untuk penelitian. Peneliti tidak berusaha untuk mendapatkan sampel yang mewakili seluruh populasi, melainkan fokus pada individu yang paling sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini target yang menjadi informan adalah :

Tabel 1. 1 sasaran informan

No.	Informan	Alasan
1.	Pemerintah yakni kasubag kerjasama dan perencanaan badan pemerintahan kabupaten Pacitan	Sebagai perumus kebijakan, pemantauan terkait Geopark Gunung Sewu.
2.	Akademisi	Sebagai peneliti dan penyedia informasi serta pengetahuan mengenai Geopark
3.	Masyarakat	Sebagai penjalin nilai budaya dan pelestari kawasan.

d. Sumber Data

Dalam sumber data utama penelitian ini adalah ;

1. Data primer :

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lokasi penelitian atau dari subjek penelitian itu sendiri. Data primer dicari melalui wawancara kepada bagian pembangunan dan kerja sama kabupaten Pacitan

2. Data sekunder :

Data sekunder merujuk pada informasi yang telah tersedia dan disusun oleh pihak lain yang relevan dengan penelitian, berupa laporan akhir gunung sewu sehingga peneliti dapat menjadikan sebagai bahan acuan dalam proses penyusunan, dan peneliti dapat melakukan pengamatan secara bebas.

e. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara tidak terstruktur, mengingat pola penelitian yang belum memiliki struktur yang pasti dan fokus yang masih berkembang. Fokus observasi akan semakin jelas seiring berjalannya proses pengamatan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat melakukan

pengamatan secara bebas, mencatat hal-hal penting, dan melakukan analisis untuk menarik kesimpulan awal.

2. Wawancara

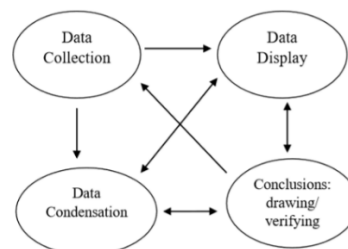
Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih, yang bertujuan untuk memperoleh data primer sebagai tambahan dari teknik pengumpulan data lainnya serta untuk menguji hasil yang telah diperoleh. (Creswell, 2016). Teknik wawancara digunakan untuk mendalami informasi lebih lanjut, sebagai pelengkap dari metode kuesioner yang mungkin kurang memberikan pemahaman yang mendalam. Dengan wawancara, informasi yang diperoleh akan lebih terperinci dan jelas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mencatat peristiwa atau keadaan yang telah terjadi, yang mencakup kondisi objek penelitian.

f. Analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang diusulkan oleh (Miles, et.al 2014.) Proses yang harus dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan teori ini melibatkan penjelasan konsep ilmiah mengenai masalah yang akan diteliti. Peneliti juga perlu melakukan kategorisasi serta mendeskripsikan data yang diperoleh berdasarkan fakta di lapangan. Yang penting, kegiatan pengumpulan data dan pengolahan data harus saling terhubung dan tidak boleh dipisahkan satu sama lain.



gambar 2.1 teknik analisis data

Setelah data terkumpul melalui teknik pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah pengolahan data oleh peneliti. Proses pengolahan data kualitatif menurut Miles dan Huberman melibatkan beberapa tahapan, antara lain (Prastiani & Subekti, 2019.), ditunjukkan dengan 3 jalur yaitu :

1. Reduksi data berarti menyaring, merangkum, dan memfokuskan informasi pada aspek-aspek yang relevan dengan topik penelitian. Ketika peneliti mengumpulkan data melalui observasi lapangan terkait digitalisasi manuskrip di Museum Radya Pustaka, data yang terkumpul cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara rinci. Selanjutnya, data yang banyak ini dianalisis dengan cara melakukan reduksi data.
2. Penyajian data dalam penelitian kualitatif sering kali dilakukan dengan menggunakan teks naratif untuk menggambarkan informasi yang diperoleh. Proses penyajian data ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam memahami informasi yang ada, serta memudahkan dalam menarik kesimpulan dari hasil penelitian.
3. Kondensi data (data condensation), lebih merujuk kepada proses pemilihan data, penyederhanaan data, mengabstrakan dan mentransformasikan data dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan.
4. Penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti dengan cara memeriksa penyajian data dan menganalisis data yang relevan, sehingga dapat disusun kesimpulan yang didasarkan pada temuan yang ada.

g. Keabsahan data

Keabsahan data sangat penting untuk memastikan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Triangulasi adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan melibatkan unsur-unsur lain selain data itu sendiri. Tujuannya adalah untuk melakukan

pemeriksaan ulang atau perbandingan terhadap data yang ada. Dalam hal ini, triangulasi mengacu pada pemeriksaan kredibilitas informasi dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, metode, dan periode waktu yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif, analisis data memerlukan teknik tertentu untuk memastikan keabsahan data. Untuk mencapai keabsahan data yang tinggi, uji keabsahan dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi, yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang berbeda. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, triangulasi yang digunakan mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Denzin (1978) dalam (Maanen, 2016) Untuk menguji keabsahan data, peneliti melaksanakan teknik triangulasi, yang mencakup triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Proses triangulasi sumber data dilakukan dengan cara membandingkan atau memverifikasi data yang diperoleh melalui observasi dengan informasi yang didapatkan dari wawancara dengan informan, guna memastikan kevalidan data yang ditemukan.

